

2024

Laporan Monitoring dan  
Evaluasi Kinerja Triwulan II



**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu organisasi pemerintah yang dituntut dari tahun ketahun untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan sebuah organisasi dipengaruhi oleh ketepatan, kualitas dan transparansi penyampaian pelaporan kinerja. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai ungkapan komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirkata semoga laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi

pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Purwakarta, Juli 2024  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA



dr. H. DENI DARMAWAN, MARS  
Pembina Tingkat I  
NIP.1975091329006041008

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN....</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan dan Keluaran.....	4
1.4. Ruang Lingkup.....	5
<b>BAB II EVALUASI KINERJA</b>	
2.1. Perjanjian Kinerja.....	6
2.2. Capaian Kinerja.....	6
<b>BAB III</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Monev Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024. Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang

sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Laporan kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan adalah berlandaskan pada:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

### **1.3 Tujuan dan Keluaran**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan monitoring, evaluasi serta membuat pelaporan secara vertikal maupun horisontal terhadap kegiatan-kegiatan yang akan, sedang, maupun telah dilaksanakan melalui kinerja yang profesional untuk menghasilkan keluaran sesuai target yang diharapkan. Disamping itu juga memantau kinerja dan hasil kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang terukur melalui pelaporan monitoring dan evaluasi dengan lancar dan sistematis (bulanan, triwulan, semester, tahunan), sehingga diperoleh pelaporan monitoring dan evaluasi yang baik dan sistematis. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah terpantaunya kinerja dan hasil kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Keluaran (output) yang diharapkan dari penyelenggaraan monev adalah :

1. Monitoring dan Evaluasi

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tahun Anggaran 2024.
3. Laporan berkala pelaksanaan kegiatan baik bulanan Semester dan Tahunan.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan rapat monev Triwulan II dalam bentuk pertemuan koordinasi internal dan penyampaian laporan triwulan. Oleh penanggung jawab kegiatan melibatkan anggota tim kinerja, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pelaksana monev, untuk periode triwulan II tahun anggaran 2024 ini pelaporan monev dilaksanakan secara internal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

## BAB II

### EVALUASI KINERJA

#### **2.1. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Dinas dengan Bupati Purwakarta memuat sasaran tujuan terdapat 1 (satu) indikator, sasaran utama terdapat 2 (dua) indikator dan sasaran program terdapat 44 (empat puluh empat) indikator, sehingga terdapat 47 (empat puluh tujuh) indikator yang diukur dalam penilaian kinerja di Dinas Kesehatan.

#### **2.2. Capaian Kinerja**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja Program, yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II:

Tabel 2.2

## Capaian Kinerja TW II Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	30	31
				631.252.510.827		207.133.828.294		237.686.073.189		20.506.580.983		45.645.114.136			Dinas Kesehatan	SEDANG
				631.252.510.827		207.133.828.294		237.686.073.189		20.506.580.983		45.645.114.136	61,69	6,91	Dinas Kesehatan	
<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>325.328.371.353</b>		<b>106.523.567.079</b>		<b>109.544.610.449</b>		<b>17.191.919.829</b>		<b>35.211.795.675</b>		<b>10,82</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		BB		BB		88,89		Dinas Kesehatan	TINGGI
<b>Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				<b>262.216.111.994</b>		<b>86.109.252.055</b>		<b>114.025.181.740</b>		<b>70.327.655</b>		<b>4.281.919.081</b>		<b>1,63</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	65,00		50,00		50,00		100,00		100,00		153,85		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00		100,00		100,00		19,64		34,19		34,19		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00		100,00		100,00		21,08		36,53		36,53		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00		100,00		100,00		22,14		38,45		38,45		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		19,24		32,95		32,95		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Persentase anak usia pendidikan	Persen	100,00		100,00		100,00		60,89		60,89		60,89		Dinas	RENDAH
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		16,13		38,02		38,02		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		18,00		35,80		35,80		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		80,00		80,00		14,34		45,95		45,95		Dinas Kesehatan	RENDAH
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		12,03		41,89		41,89		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		41,31		67,83		67,83		Dinas Kesehatan	SEDANG
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00		95,00		95,00		78,00		80,00		80,00		Dinas Kesehatan	TINGGI
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00		80,00		80,00		22,00		39,30		39,30		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		19,64		34,19		34,19		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		21,08		36,53		36,53		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		22,14		38,45		38,45		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH

	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00	100,00		19,24		32,95		32,95		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00	100,00		60,89		60,89		60,89		Dinas Kesehatan	RENDAH
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00	100,00		20,05		41,08		41,08		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00	100,00		20,00		49,20		49,20		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00	100,00		14,34		45,95		45,95		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00	100,00		12,03		41,89		41,89		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00	100,00		41,31		67,83		67,83		Dinas Kesehatan	SEDANG
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		95,00	95,00		78,00		80,00		80,00		Dinas Kesehatan	TINGGI
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		80,00	80,00		30,00		52,00		52,00		Dinas Kesehatan	RENDAH
	Rasio posyandu per satuan balita	Poin	17,86		17,34	17,34		14,83		14,83		83,03		Dinas Kesehatan	TINGGI
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,00		100,00	100,00		23,11		40,66		40,66		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00		100,00	100,00		21,25		37,01		37,01		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00		100,00	100,00		15,20		15,62		15,62		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00		100,00	100,00		88,89		88,89		88,89		Dinas Kesehatan	TINGGI
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100,00		100,00	100,00		15,60		35,12		35,12		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100,00		100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	90,00		70,00	70,00		19,23		37,57		41,74		Dinas Kesehatan	RENDAH
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100,00		90,00	90,00		30,00		35,00		35,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	171,39		245,65	245,65		103,29		209,74		122,38		Dinas Kesehatan	TINGGI
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	1,94		2,58	2,58		2,95		5,42		35,79		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	100,00		90,00	90,00		78,00		79,00		79,00		Dinas Kesehatan	TINGGI
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	95,00		90,00	90,00		84,00		83,00		87,37		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00		100,00	100,00		57,41		83,86		83,86		Dinas Kesehatan	TINGGI
	Penderita diare yang ditangani	Persen	100,00		85,00	85,00		17,47		36,49		36,49		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	100,00		100,00	100,00		25,00		25,00		25,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH

	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	100,00		80,00		80,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,00		100,00		100,00		24,64		43,56		43,56	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
	Cakupan puskesmas	Persen	100,00		100,00		100,00		117,65		117,65		117,65	Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
	Cakupan pelayanan nifas	Persen	100,00		100,00		100,00		21,08		36,53		36,53	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100,00		100,00		100,00		16,98		30,10		30,10	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100,00		100,00		100,00		11,82		32,95		32,95	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI	
<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>					<b>39.603.027.480</b>		<b>13.201.009.160</b>		<b>13.064.577.000</b>		<b>3.244.333.499</b>		<b>6.009.524.380</b>	<b>15,17</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	40,00		30,00		30,00		75,00		75,00		187,50	Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
	Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	40,00		30,00		30,00		61,90		65,40		163,50	Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	40,00		30,00		30,00		27,95		48,78		121,95	Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
	Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	40,00		30,00		30,00		73,16		71,86		179,65	Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
	Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	40,00		30,00		30,00		45,00		45,00		112,50	Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	40,00		30,00		30,00		34,90		34,90		87,25	Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
<b>Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</b>					<b>2.045.000.000</b>		<b>620.000.000</b>		<b>590.444.000</b>		<b>0</b>		<b>125.395.000</b>	<b>6,13</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,15		78,53		78,53	Dinas Kesehatan	TINGGI	
	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	85,00		80,00		80,00		25,15		78,53		92,39	Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI	
<b>Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>					<b>2.060.000.000</b>		<b>680.000.000</b>		<b>461.260.000</b>		<b>0</b>		<b>16.480.000</b>	<b>0,80</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	10,00		6,00		6,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
	Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	100,00		89,00		89,00		0,00		33,33		33,33	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pada Triwulan II.